

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

COMMUNITY RESPONSES TO THE REGIONAL EDUCATION GUARANTEE PROGRAM IN YOGYAKARTA

¹Henny Pamungkas, ²Dr. Nasiwan, M. Si.
Departemen Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Yogyakarta
hennypamungkas.2017@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan masyarakat penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) terhadap program JPD di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode naturalistik dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian adalah masyarakat penerima JPD di Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan *member check*. Teknik analisis data menggunakan analisis model Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian ialah masyarakat penerima JPD memiliki tanggapan dalam kategori cukup yang dideskripsikan melalui tiga komponen; 1) Komponen kognitif, masyarakat penerima JPD memahami arti dan tujuan program, jumlah alokasi dana, sistem penyaluran dan peraturan terbaru program JPD. 2) Komponen afektif, masyarakat penerima JPD merasa senang dan terbantu karena mendapatkan bantuan biaya pribadi, biaya pendidikan, dan mendapatkan kuota khusus saat mendaftar ke sekolah. 3) Komponen konatif, masyarakat penerima JPD mendukung tercapainya program dengan memberikan motivasi, semangat, dukungan, memilihkan sekolah sesuai kebutuhan anak, dan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dimana akan bersekolah.

Kata Kunci: Tanggapan Masyarakat, Program JPD

ABSTRACT

This study aims to describe the response of the recipient community of Regional Education Guarantee (JPD) to the JPD program in the city of Yogyakarta. This research is a qualitative research using naturalistic methods and using a purposive sampling technique. The research subjects were JPD beneficiary communities in the city of Yogyakarta. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. Data validity uses source triangulation and member checks. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model analysis, namely data collection, data reduction, data presentation, and verification or conclusions. The results of the research are that the JPD recipient community has responses in the sufficient category which are described through three components; 1) Cognitive component, the JPD beneficiary community understands the meaning and purpose of the program, the amount of fund allocation, the distribution system and the latest JPD program regulations. 2) The affective component, the JPD beneficiary community feels happy and helped because they get assistance with personal costs, educational expenses, and get a special quota when registering to school. 3) The conative component, the JPD recipient community supports the achievement of the program by providing motivation, encouragement, support, selecting schools according to children's needs, and giving children the freedom to choose where to go to school.

Keywords: *Community Response, JPD Program*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan berperan menciptakan generasi penerus bangsa yang mampu mengembangkan potensi diri dengan memiliki kecakapan intelektual dan emosional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana dan proses belajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pentingnya pendidikan dalam membantu membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul, menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang yang masih menjadi perhatian utama dalam suatu negara.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat menentukan maju mundurnya suatu negara. Muhandi (2004: 478) menjelaskan bahwa pendidikan mempunyai kontribusi yang berharga dan signifikan untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, hal ini dikarenakan peningkatan kualitas suatu bangsa bertumpu pada sumber daya manusianya yang hanya dapat dicapai melalui penekanan pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada tingginya tingkat produktivitas sehingga berperan dalam proses pembangunan suatu negara. Penyediaan pendidikan yang merata dan berkualitas tentunya sangat berperan dalam keberhasilan menciptakan output yang unggul.

Dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari semakin tingginya biaya pendidikan yang diperlukan. Biaya pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui biaya pendidikan, sekolah dapat menyediakan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas sarana prasarana yang dapat membantu proses belajar peserta didik. Fauzi (2020: 52) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan faktor utama dalam menjamin mutu dan kualitas pendidikan. Meski bukan merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan, namun tanpa adanya biaya pendidikan yang mencukupi,

maka pendidikan yang berkualitas tidak akan tercapai.

Pentingnya biaya pendidikan dalam proses peningkatan kualitas pendidikan, Pemerintah Indonesia setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan hasil konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 yang diunggah melalui puslapdik.kemdikbud.go.id tanggal 18 Agustus 2021 dijelaskan bahwa dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 541,7 triliun. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20%, bahkan alokasi anggaran pendidikan yang disediakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam pembahasan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah yang diunggah melalui kemenkeu.go.id tanggal 30 Agustus 2022, Menteri Keuangan menyampaikan anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Anggaran tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan akses pendidikan melalui wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama wilayah 3T, penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan PAUD.

Meski Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana APBN untuk pendidikan, namun hal ini tidak memungkiri bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Fitri (2021: 1618-1619) menjelaskan beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu: 1) Semakin banyaknya peserta didik yang tidak sebanding dengan ketersediaan sarana pendidikan bermutu, 2) Kurangnya sarana dan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, 3) Mahalnya biaya pendidikan, 4) Ketidaktepatan hasil pendidikan, 5) Ketidakefisienan sistem pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan turut menyumbang timbulnya masalah baru di dunia pendidikan Indonesia. Tingkat ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya berada pada kelas menengah keatas menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah karena alasan ekonomi. Berdasarkan Survey Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 dalam puslapdik.kemdikbud.go.id, BPS melansir data

bahwa 76% keluarga mengaku anaknya mengalami putus sekolah karena alasan ekonomi. Sebesar 67,0% tidak mampu membayar sekolah, sisanya 8,7% harus mencari nafkah. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan serta menyediakan pendidikan yang berkualitas, merata dan adil bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang masing-masing individu. Upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas didukung dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bermakna pengakuan atau penyerahan wewenang, hak, dan kewajiban guna mengelola urusan pemerintahan dalam bidang tertentu dari Pemerintah pusat ke Daerah. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang dikelola dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga terdapat perubahan pengelolaan pendidikan dari bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Melalui desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan inovasi dan strategi dalam peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing serta mampu merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan telah dilaksanakan salah satunya di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan desentralisasi pendidikan dengan menerapkan program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Penerapan program ini sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta salah satunya dengan mendukung penuntasan wajib belajar 12 tahun serta pemerataan pendidikan sehingga mampu menekan angka putus sekolah terutama karena alasan biaya di Kota Yogyakarta. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dijelaskan bahwa Jaminan Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat JPD adalah bantuan biaya pendidikan bagi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) pemegang kartu

KMS pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari Dinas Sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh masyarakat penerima KMS berhak mendapatkan JPD dengan jumlah sesuai tingkat pendidikan yang ditempuh.

Program JPD di Kota Yogyakarta dimulai sejak tahun 2007 kemudian pada tahun 2020, JPD mengalami perubahan yakni diberikan dalam bentuk Kartu Jogja Berprestasi. Dilansir dari dindikpora.jogjakota.co.id pada tanggal 17 Juli 2020, Sekda Kota Yogyakarta dan Direktur Pemasaran PT BPD DIY secara simbolis menyerahkan Kartu Jogja Berprestasi kepada perwakilan peserta didik dari TK hingga SMA/K. Kartu Jogja Berprestasi selanjutnya disingkat KJB merupakan kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan JPD dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran non tunai yang pertama dan satu-satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. KJB diberikan khusus kepada peserta didik dari Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dengan identitas memiliki KMS, peserta didik penghuni panti asuhan swasta dalam daerah, peserta didik usia sekolah yang berada di satuan PNF sejenis swasta, dan peserta didik yang termasuk dalam KSJPS akan tetapi nama peserta didik tidak tercantum dalam kartu KMS.

Program JPD diberikan kepada peserta didik yang duduk dibangku TK hingga SMA/SMK termasuk bagi mereka yang sedang menempuh kejar paket. Penerima program JPD pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 dengan data ssebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Penerima Program JPD Dalam Setiap Jenjang Tahun 2020-2022

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2022
1.	TK/TKIT/RA	1357	1135
2.	SD/SDIT/SDLB/MI	5174	4804
3.	SMP/MTs/SMPLB	2852	2976
4.	SMA/MA/SMALB	634	745
5.	SMK	2094	2092
6.	PKBM/SKB	54	91
Total		12.165	11.843

Sumber: Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2022

Berdasarkan data yang diunggah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam <https://dindikpora.jogjakota.go.id/page/index/upt-p-jpd>, jumlah penerima program JPD pada tahun 2020 sebanyak 12.165 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 11.843 orang. Dari data tersebut, dalam kurun waktu dua tahun penerima program JPD mengalami penurunan. Adanya penurunan ditunjukkan dari berkurangnya penerima program pada tingkat SD/SDIT/SDLB/MI dari 5.174 orang menjadi 4.804 orang.

JPD diberikan guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat terutama penerima KMS (KSJPS) agar memperoleh layanan Pendidikan yang semestinya. Namun, Sidik (2015: 40) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa implementasi program JPD di Kota Yogyakarta belum efektif mencapai tujuannya karena beberapa alasan. Pertama, hasil penilaian keluaran (output) program seperti akses, bias, cakupan, dan ketepatan layanan menunjukkan belum efektif dilaksanakan. Kedua, dampak jangka menengah (intermediate) belum menunjukkan efektif karena motivasi belajar maupun prestasi belajar siswa KMS masih dapat dikatakan rendah. Selanjutnya, dampak jangka panjang (long-term) belum dapat terwujud dan masih menjadi harapan program.

Meski JPD merupakan salah satu program yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah pendidikan di Kota Yogyakarta, namun ternyata masih terdapat ruang yang memungkinkan terjadinya anak putus sekolah. Septianto (2021: 8) menjelaskan bahwa dari tahun 2016-2020 di 13 dari 14 kecamatan di Kota Yogyakarta, terdapat 162 anak yang mengalami putus sekolah. Faktor ekonomi merupakan faktor paling banyak menyebabkan anak putus sekolah, yakni 31 anak dari 162 anak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian membahas tanggapan masyarakat terhadap adanya program JPD yang dikemas dalam penelitian berjudul “Tanggapan Masyarakat Terhadap Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta”.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan

pendekatan naturalistik. Sugiyono (2018: 9) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (lawan dari eksperimen), dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan kurang lebih selama 3 bulan dalam kurun waktu Oktober 2021 hingga Januari 2022, kemudian dilanjutkan dengan menyusun hasil penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian di 6 Kemantren di Kota Yogyakarta karena program JPD hanya diterapkan di Kota Yogyakarta.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber penelitian diperlukan sebagai pemberi informasi dalam pengambilan data penelitian. Informan peneliti yaitu

1. Data Primer

Sugiyono (2018: 104) menjelaskan sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara. Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima program JPD di Kota Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2018: 104) menjelaskan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian mengenai tanggapan masyarakat terhadap program JPD meliputi dokumen berupa peraturan Walikota Yogyakarta tentang pemberian JPD, hasil PPDB penerima JPD, dan dokumentasi pendukung lainnya.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian terdapat proses pengumpulan data dengan menggunakan dua teknik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri,

E. Keabsahan Data

Teknik dalam memeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi selanjutnya dilakukan *member check*, yakni melakukan pengecekan data yang telah diperoleh kepada narasumber. Data yang telah dikumpulkan perlu di periksa kebenarannya, sehingga pemilihan sumber data dan teknik pengumpulan data harus tepat. Triangulasi dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Huberman dan Miles. Dalam model ini terdapat beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan aktivitas dalam analisis data bersifat kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggapan masyarakat penerima JPD Terhadap Program JPD di Kota Yogyakarta. Sesuai teori yang dijelaskan Azwar (2016: 23-24) tanggapan terdiri atas tiga komponen yaitu: 1) komponen kognitif yakni pemahaman dan atau pandangan mengenai suatu objek yang merupakan hasil dari apa yang telah dilihat dan diketahui oleh individu. 2) komponen afektif, berkaitan dengan emosional subjektif atau perasaan individu akan suatu objek yang dihadapinya. 3) komponen konatif merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam menghadapi objek. Perilaku tidak hanya dapat dilihat secara langsung tetapi juga termasuk pernyataan yang diucapkan individu.

1. Komponen Kognitif

Azwar (2016: 23-24) menjelaskan komponen kognitif merupakan pemahaman dan atau pandangan mengenai suatu objek yang merupakan hasil dari apa yang telah dilihat dan diketahui oleh individu. Pemahaman muncul dari adanya kepercayaan individu terhadap objek yang diterimanya. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah melihat dan mengingat sesuatu tersebut. Seseorang dapat

dikatakan memahami sesuatu apabila dapat memberikan penjelasan menggunakan kalimatnya sendiri, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman masyarakat penerima program JPD terhadap program JPD yang telah diterapkan sejak 2007.

Masyarakat penerima JPD lebih mengenal program JPD dengan nama KMS. Hal ini dikarenakan penerima program ini adalah mereka yang mendapatkan Kartu Menuju Sehat (KMS) dimana penerima akan diverifikasi petugas setiap akhir tahun. Meski demikian, masyarakat memahami akan maksud dan tujuan dari diterapkannya program JPD yakni memberikan bantuan biaya pendidikan agar tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan biaya. Masyarakat penerima JPD juga memahami bahwa bantuan biaya pendidikan tidak hanya untuk biaya operasional sekolah namun dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah.

Program JPD yang masih diterapkan hingga saat ini mengalami berbagai macam perubahan. Pada tahun 2020 penyaluran program JPD diberikan melalui alat pembayaran non tunai yang disebut Kartu Jogja Berprestasi (KJB). Masyarakat penerima JPD memahami adanya perubahan ini. Hal ini ditunjukkan bahwa masyarakat mengetahui bagaimana cara penggunaan dan peraturan terbaru dengan menggunakan KJB, yakni jika dulu dana bantuan dapat digunakan untuk berbelanja di toko manapun, saat ini KJB hanya dapat digunakan di toko tertentu yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Dengan adanya KJB, penggunaan biaya pribadi, penerima JPD tidak perlu menukarkan nota belanja ke sekolah seperti sebelumnya. Masyarakat juga mengetahui besarnya pengalokasian dana bantuan yang dulu sepenuhnya dikelola oleh sekolah tetapi saat ini dibagi secara jelas yakni 60% untuk biaya operasional sekolah dan 40% untuk biaya pribadi.

Masyarakat penerima JPD memahami peraturan penggunaan bantuan biaya JPD dengan sistem sebelumnya dan adanya perubahan saat ini menggunakan KJB. Adanya pembaharuan sistem penyaluran JPD menghasilkan dua pandangan berbeda. Berdasarkan hasil wawancara, empat narasumber menerima sistem baru yang saat ini

berjalan dan tiga narasumber lebih nyaman dengan sistem sebelumnya. Dari hasil pembahasan mengenai pemahaman penerima JPD terhadap program JPD, masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terhadap program JPD yang diterimanya.

2. Komponen Afektif

Komponen afektif berkaitan dengan kondisi emosional atau perasaan individu. Azwar (2010: 23-24) menjelaskan komponen afektif merupakan emosional subjektif atau perasaan individu akan suatu objek yang dihadapinya. Perasaan yang muncul berhubungan dengan pemahaman individu terhadap suatu objek yang mengenainya (stimulus). Perasaan yang dirasakan terhadap objek yang diterimanya dapat diketahui dari pernyataan yang disampaikan oleh individu.

Program JPD yang diterapkan di Kota Yogyakarta membawa dampak positif bagi penerimanya. Meski terdapat dua pandangan dalam menerima pembaharuan sistem penyaluran program, namun masyarakat penerima JPD di Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya program ini. Program JPD yang diberikan dua kali dalam satu tahun membantu meringankan biaya pendidikan. Bantuan biaya pendidikan yang diberikan tidak hanya untuk operasional sekolah seperti SPP dan daftar ulang, namun juga biaya pribadi yang dapat digunakan untuk belanja perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, sepatu, dan buku.

Dampak positif diterapkannya program JPD semakin dirasakan oleh penerima yang memiliki anak usia sekolah lebih dari satu. Hal ini mengingat seiring berjalannya waktu, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas diperlukan biaya pendidikan yang tinggi, sehingga dengan adanya program JPD turut membantu penerima JPD mendapatkan pendidikan berkualitas. Selain mendapatkan bantuan biaya pendidikan, penerima JPD juga mendapatkan kuota khusus pada saat penerimaan peserta didik baru yakni melalui jalur afirmasi. Setiap SMP dan SMA/SMK negeri di Jogja menyediakan 20% dari total kuota sekolah untuk jalur afirmasi.

Dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat penerima JPD menghasilkan adanya harapan akan berjalannya program JPD. Masyarakat berharap program JPD dapat terus dilaksanakan dan tepat sasaran, sehingga dapat

mencapai tujuan dari diterapkannya program yakni agar tidak ada masyarakat penerima KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya. Program JPD juga diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat membantu menekan angka putus sekolah dan pengentasan wajib belajar 12 tahun melalui pemerataan pendidikan.

3. Komponen Konatif

Komponen konatif meliputi perilaku yang ditunjukkan individu dalam menghadapi suatu objek. Perilaku yang ditunjukkan oleh individu dipengaruhi oleh pemahaman dan perasaan individu akan suatu objek yang dihadapinya. Azwar (2010: 23-24) menjelaskan komponen konatif perilaku menunjukkan bagaimana individu berperilaku terhadap objek yang dihadapinya, bentuk perilaku tidak hanya dapat dilihat secara langsung, tetapi juga pernyataan yang diucapkan individu. Dalam pembahasan ini, konatif yang dimaksud adalah mengenai upaya yang dilakukan masyarakat penerima JPD dalam membantu mendukung tercapainya program JPD.

Masyarakat penerima JPD dalam mendukung tercapainya tujuan program melakukan upaya dengan memberikan semangat dan motivasi kepada anak agar rajin belajar. Selain itu juga dilakukan pendampingan belajar terutama saat sekolah online selama masa pandemi Covid-19. Dalam memberikan semangat, motivasi, dan pendampingan belajar dilakukan dengan saling bekerja sama antar anggota keluarga. Pemilihan sekolah untuk anak juga dilakukan penerima JPD dengan dasar alasan tertentu, seperti kondisi anak dan akses kemudahan dalam menuju ke sekolah. Berdasarkan pernyataan saat wawancara, penerima JPD juga ada yang memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dimana akan bersekolah, baik negeri maupun swasta, SMA atau SMK sesuai minatnya dengan harapan anak tidak putus sekolah.

Berdasarkan pembahasan diatas dan penjelasan dua komponen sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat mengenai program JPD adalah cukup. Meski terdapat narasumber yang merasa lebih nyaman sebelum adanya perubahan penyaluran JPD namun mereka tetap merasa terbantu dengan diterapkannya program ini. Hal ini didukung dengan adanya upaya yang dilakukan masyarakat dalam membantu tercapainya program JPD.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah diambil dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan mengenai tanggapan masyarakat terhadap program JPD di Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki tanggapan cukup. Masyarakat penerima JPD memiliki kesimpulan tanggapan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1) Komponen kognitif, masyarakat penerima JPD memahami maksud dan tujuan dari diterapkannya program JPD. Hal ini ditunjukkan dari pemahaman masyarakat mengenai arti, tujuan program, besar alokasi bantuan, perubahan penyaluran dan peraturan program yang saat ini menggunakan KJB. 2) Komponen afektif, masyarakat penerima JPD merasa terbantu dengan adanya program JPD dalam meringankan biaya pendidikan dan memberikan kuota khusus dalam PPDB melalui jalur afirmasi. 3) Komponen konatif, dalam mendukung tercapainya program JPD, masyarakat penerima JPD memberikan semangat, motivasi, pendampingan belajar, memilihkan sekolah, dan memberikan kebebasan dalam melanjutkan pendidikan kepada anak. Meski terdapat narasumber yang merasa lebih nyaman sebelum adanya perubahan penyaluran JPD, namun mereka tetap merasa terbantu dengan diterapkannya program ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah melakukan pengawasan dalam berjalannya program JPD agar tepat sasaran, memastikan bahwa bantuan biaya pendidikan digunakan semestinya, dan mengevaluasi program JPD setiap tahunnya agar tidak menjadikan masyarakat bergantung pada bantuan yang diberikan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat penerima JPD mempertahankan upaya yang dilakukan dalam mendukung tercapainya tujuan program, sehingga nantinya program ini dapat berhasil dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Kota Yogyakarta.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara yang terfokus pada anak penerima program JPD, sehingga dapat diketahui tanggapan anak penerima JPD secara mendalam baik secara kognitif, afektif, maupun konatif, serta melakukan penelitian mengenai dampak adanya program JPD di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, L., Sujaini, H., & Tursina. (2020). Implementasi sentiment analysis tanggapan masyarakat terhadap pembangunan di Kota Pontianak. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 8(2), 183-190.
- Azwar, S. (2016). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Rencana kerja pemerintah daerah kota yogyakarta tahun 2022. Diakses tanggal 23 Mei 2023 dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta. (2015). Proyeksi penduduk kabupaten/kota tahunan 2010-2020 Provinsi DI Yogyakarta. www.bps.go.id (diakses pada 1 Desember 2021)
- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Dindikpora. (2020). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3, Tahun 2020, tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah*.
- _____. (2020). Kartu Jogja Berprestasi (KJB). Diakses tanggal 29 Juli 2021 dari www.dindikpora.jogjakota.go.id
- _____. (2022). Penerima Program JPD. Diakses tanggal 23 Mei 2023 dari <https://dindikpora.jogjakota.go.id/page/index/upt-p-jpd>

- Fauzi, A. (2020). Analisis biaya mutu dalam meningkatkan daya saing pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(1)*, 51-62.
- Fitri, S. F. (2021). Problematika kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1)*, 1617-1620.
- Hidayat, S. (2016). Tanggapan masyarakat terhadap program jam belajar masyarakat di RW 9 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V(1)*, 55-63.
- Iskandar, Z. (2012). *Psikologi Lingkungan: Teori dan Konsep*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kemendikbudristek. (2023). Sri Mulyani: anggaran pendidikan Rp 541,7 triliun relatif stabil. Diakses tanggal 1 Maret 2023 dari www.puslapdik.kemdikbud.go.id
- _____. (2023). Fakta PIP mampu turunkan angka putus sekolah. Diakses pada 2 Maret 2023 dari www.puslapdik.kemdikbud.go.id
- Kemenkeu. (2023). Pemerintah alokasikan anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp608,3 triliun. Diakses pada 1 Maret 2023 dari www.kemenkeu.go.id
- Muhardi. (2004). Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. *Lomba Karya Tulis Ilmiah Dosen, XX(4)*, 478-492.
- Nurmansyah, G., & dkk. (2019). *Pengantar antropologi: sebuah ikhtisar mengenal antropologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 1(1)*, 163-175.
- Puspitasari, R. (2016). Evaluasi kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dalam penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta, SMP Negeri 15 Yogyakarta, dan SMA Negeri 11 Yogyakarta. *Kebijakan Pendidikan, 375-383*.
- Rakhmat, J. (2018). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sarwono, S. W. (2018). *Pengantar psikologi umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Septianto, H. (2021). Pemetaan anak putus sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2016-2020. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 10(4)*, 1-11.
- Sidik, F. (2015). Implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta. *Kebijakan & Administrasi Publik, 27-42*.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, A. (2018). *Psikologi umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Geodukasi, III(1)* 38-43.
- Thoha, M. (2009). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjandra, E. A., & Tjandra, S. R. (2013). Hubungan antara komponen kognitif, komponen afektif dan kompoen perilaku terhadap sikap konsumen memanfaatkan teknologi internet. *Jurnal Manajemen, XVII(01)*, 42-52.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wawan, A., & Dewi, M. (2011). *Teori & pengukuran pengetahuan, sikap, dan*

perilaku Manusia. Yogyakarta: Nuha Medika.

Wulandari, T., & Wijayanti, A. T. (2016). Persepsi peserta didik tentang implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS di SMP Se-Kecamatan Kretek, Bantul. *Jipsindo*, 3(1), 78-100.

Yahya, M., & Amirzan. (2019). Tanggapan siswa terhadap manfaat kegiatan ekstrakurikuler olahraga dalam pengembangan prestasi dan potensi diri. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 79-87.

